EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA TUNGGAL

(Studi Pada Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

(Skripsi)

Oleh:

Wiska Bela Safitri NPM 2156041027



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2025

ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA TUNGGAL

(Studi Pada Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

Oleh

WISKA BELA SAFITRI

Program Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Tunggal merupakan upaya Negara Indonesia melalui Kementerian Sosial untuk menghormati, melindungi, dan memberikan jaminan sosial bagi lanjut usia tunggal dengan penyediaan makanan bergizi dua kali sehari. Sasaran Program ini adalah lanjut usia tunggal yang berusia 70 tahun ke atas, tergolong miskin atau tidak mampu, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan terdaftar seorang diri dalam Kartu Keluarga (KK). Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan Program Pemberian Permakanan bagi lanjut usia tunggal di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu menggunakan teori evaluasi Stufflebeam yang terdiri dari Context, Input, Process, and Product. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo belum efektif karena masih terdapat Kartu Keluarga (KK) lanjut usia belum diperbarui sehingga belum mencerminkan status lanjut usia tunggal, masih adanya keterlambatan pencairan dana dan waktu pengiriman makanan, belum tersedianya tenaga ahli gizi untuk memastikan menu makanan sesuai dengan kondisi kesehatan lansia, dan aplikasi SIKSMA masih sering mengalami gangguan teknis (eror) saat petugas kirim melakukan laporan bukti lansia telah menerima makanan tersebut.

Kata Kunci: Evaluasi, Lanjut Usia Tunggal, Program Pemberian Permakanan

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE FOOD PROVISION PROGRAM FOR SINGLE ELDERLY

(A Study In Gadingrejo District, Pringsewu Regency)

Bv

WISKA BELA SAFITRI

The Single Elderly Food Program is an effort by the state through the Ministry of Social Affairs to respect, protect, and provide social security for single elderly people by providing nutritious food twice a day. The target of this program is single elderly people aged 70 years and over, classified as poor or disadvantaged, registered in the Integrated Social Welfare Data (DTKS), and registered alone in the Family Card (KK). This study aims to assess the implementation of the Single Elderly Food Program in Gadingrejo District, Pringsewu Regency using the Stufflebeam evaluation theory consisting of Context, Input, Process, and Product. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Food Provision Program in Gadingrejo District has not been effective because the Family Card (KK) of the elderly has not been updated so that it does not reflect the status of a single elderly person, there are still delays in the disbursement of funds and the time of food delivery, the unavailability of nutrition experts to ensure the adjustment of the food menu to the health conditions of the elderly, and the SIKSMA application still often experiences technical problems (errors) when the sending officer reports evidence that the elderly have received the food.

Keywords: Evaluation, Single Elderly, Food Provision Program

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA TUNGGAL

(Studi Pada Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

Oleh

Wiska Bela Safitri

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2025 Judul Skripsi

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI LANJUT
USIA TUNGGAL (Studi Pada Kecamatan
Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

Nama Mahasiswa

: Wiska Bela Safitri

Nomor Pokok Mahasiswa

2156041027

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

PRSITAS LAMPUNG

RSITAS LAMPUNG

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Komisi Pembimbing

MENYETUJUI

Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. NIP. 19691103 200112 1 002

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPUNO

UNIVERSITAS LAMPUNC

UNIVERSETAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPENG

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPUNO

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPUNG

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.
NIP. 19700914 200604 2 001

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNI

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPUNO

UNIVERSITAS LAMPLING

CHIVERSTAS LAMPUNC

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A. NIP. 19740520 200112 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

UNIVERSITAS LAMPUNC

: Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.

AMPUNG CHIVERS LANDING

UNIVERSITAS CAMPUNG

Sekretaris

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

Penguji Utama

LAMPUNC

: Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 3 Juli 2025

UNIVERSITAS LAMPUNG

UNIVERSITAS LAMPLING

UNIVERSITAS LAMPUNG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.
- 2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 3 Juli 2025 Yang membuat pernyataan,



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Wiska Bela Safitri, dilahirkan di Podosari pada tanggal 10 Desember 2002. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Sukaryanto dan Ibu Nuryatimah yang merupakan anak kedua dan memiliki satu saudara laki-laki yang bernama Wisnu Adi Saputra.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK KH Ghalib Pringsewu pada tahun 2009-2010, dilanjutkan dengan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Rejosari pada tahun 2010-2015. Kemudian, penulis menempuh pendidikan Sekolah

Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2015-2018. Setelah itu, melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN Barat). Selama menjadi mahasiswa penulis bergabung pada Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2024 di Desa Sukarame, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya, penulis mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 6 bulan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Q.S. Al- Baqarah:286)

"Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu akan membentuk karakter kuat melawan kesulitan."

(Helen Keller)

"Mencoba adalah bentuk syukur atas kesempatan dan keberanian adalah awal dari perubahan."

(Wiska Bela Safitri)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucap Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tersayang

Ayahanda Sukaryanto dan Ibunda Nuryatimah yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, mendoakan, mendukung tanpa henti mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih untuk semua kasih sayang yang tulus luar biasa, sehingga penulis mampu sampai di titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari kebahagiaan yang bisa penulis persembahkan untuk kedua orang tua.

Kakakku Tersayang

Kakak Wisnu Adi Saputra yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih atas doa, perhatian dan keyakinan yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.

Almamaterku Universitas Lampung

Terima kasih atas ilmu, pengalaman dan kesempatan berharga yang diberikan kepada penulis.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang luar biasa. Berkat limpahan karunia dan kemudahan dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Tunggal (Studi pada Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)". Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, yang ajarannya menjadi inspirasi dalam setiap langkah.

Skripsi yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Tunggal (Studi pada Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)" merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Namun, dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan arahan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Almarhum Bapak Sukaryanto dan Ibu Nuryatimah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, cinta, dan pengorbanan yang luar biasa. Meskipun bapak kini telah tiada, semangat dan perjuangan bapak agar anaknya bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis. Terima kasih atas seluruh tenaga, waktu, pikiran dan materi yang telah bapak berikan serta kasih sayang yang luar biasa yang membuat penulis bangga memiliki sosok bapak yang tidak pernah mengenal lelah. Semoga amal ibadah bapak

diterima di sisi Allah SWT, Aamiin. Ibu, terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang selalu mengalir untuk penulis. Berkat doa-doa yang ibu panjatkan setiap hari, penulis mampu melewati langkah demi langkah. Dukungan Ibu, baik dalam bentuk doa, perhatian, semangat, maupun pengorbanan, menjadi sumber kekuatan yang mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah mengajarkan penulis untuk menjadi pribadi yang tabah, kuat, dan ikhlas. Penulis sangat bersyukur dan bangga memiliki sosok ibu yang luar biasa. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan dan umur panjang untuk Ibu.

- 2. Kakakku Wisnu Adi Saputra, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, materi, dan kesediaannya untuk mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih telah menjadi sosok kakak yang selalu ada dan percaya pada kemampuan adiknya. Semoga segala kebaikan dan ketulusan hatimu selalu dibalas dengan kebahagiaan, keberkahan dan kesuksesan di setiap jalan yang ditempuh.
- 3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, ilmu, serta bimbingan yang telah bapak berikan selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas kritik dan saran yang sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dengan sebaik-baiknya.
- 4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, ilmu, serta bimbingan yang telah ibu berikan selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas kritik dan saran yang sangat membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi dengan sebaik-baiknya.
- 5. Ibu Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A. Ph.D selaku Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing Akademik. Terima Kasih atas waktu, saran dan kritik

- yang ibu berikan sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
- 6. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
- 7. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- 8. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- 10. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
- 11. Seluruh Informan penelitian Ibu Ika Hadiyari, S.Pd. MM., Bapak Oki Saputra, S.Sos.I., Ibu Erliasih, Bapak Heriyanto, Ibu Minarti, Ibu Jasem, Bapak Ratiman dan Bapak Abdul ghoni, terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 12. Seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama magang dan telah membantu penulis dalam memperoleh informasi penelitian.
- 13. Keluarga besar Bapak Darto Wiyati dan Bapak Murni. Terima kasih atas seluruh bantuan dan doanya. Semoga keluarga Paman dan Tante selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
- 14. Muhammad Alfauzan Dyas, terima kasih atas tenaga dan waktu yang telah diberikan untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menemani penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir kelulusan.
- 15. Sahabatku Prameswari, Berta Pramudita, Alin Ruliati, dan Lisel Niya Sika terima kasih sudah mememani penulis pada awal perkuliahan hingga di fase ini. Terima kasih atas canda tawa, suka duka yang diberikan. Terima kasih sudah membantu penulis selama proses perkuliahan dan proses penyusunan skripsi.

16. Sahabatku Ria Ariana, Ardelia Atikah Rahma, dan Zahra Nur Sabrina, terima kasih telah menemani penulis pada masa SMA hingga saat ini, terima kasih atas dukungannya, canda tawa dan membuat hari-hari penulis lebih berwarna.

17. Temen-teman KKN Dila, Eta, Ais, Sabi, Adil, Arsyah terima kasih pengalaman dan pembelajaran life skill yang harus dimiliki. Terima kasih dukungan, bantuan dan canda tawanya.

18. Teman-teman GILGAMARA, terima kasih untuk bantuan dan pengalamannya. Terima kasih sudah memberitahu penulis mengenai informasi-informasi yang sangat membantu penulis selama perkuliahan.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

20. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah berhasil melewati setiap fase dalam perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, terus berusaha keras, dan tidak menyerah demi mewujudkan impian orang tua yaitu menjadi seorang sarjana. Terima kasih telah tetap kuat, meskipun di fase ini harus dilalui tanpa kehadiran sosok Ayah yang biasanya menjadi sumber semangat. Meski tanpa pelukan dan nasihatnya, langkah tetap tegap, hati tetap hangat, dan tujuan terus digenggam erat. Semoga pencapaian ini menjadi wujud bakti yang tulus untuk keluarga.

Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf jika skripsi ini masih memiliki kekurangan. Namun, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 3 Juli 2025 Penulis

Wiska Bela Safitri

DAFTAR ISI

DA	FT	AR ISI	· •••••••••••••••••••••••••••••••••	ii		
DA	FT	AR TA	BEL	iv		
DA	FT	AR GA	MBAR	v		
DA	FT	AR SI	NGKATAN	vi		
I.]	PEI	NDAH	ULUAN	1		
	1.1	Latar 1	Belakang	1		
	1.2	Rumusan Masalah8				
	1.3 Tujuan Penelitian					
	1.4	Manfa	at Penelitian	8		
II.	TIN	IJAUA	N PUSTAKA	10		
,	2.1	Peneli	tian Terdahulu	10		
,	2.2	Kebija	kan Publik	11		
,	2.3	Evalua	asi Kebijakan	14		
		2.3.1	Definisi Evaluasi Kebijakan	14		
		2.3.2	Tujuan Evaluasi Kebijakan	15		
		2.3.3	Jenis Evaluasi Kebijakan	16		
		2.3.4	Tipe Evaluasi Kebijakan	16		
		2.3.5	Pendekatan Evaluasi Kebijakan	17		
		2.3.6	Model-model Evaluasi Kebijakan	18		
,	2.4	Lanjut	Usia	21		
,	2.5	Progra	ım Pemberian Permakanan	24		
		2.5.1	Definisi Program Pemberian Permakanan	24		
		2.5.2	Tujuan dan Sasaran Program Pemberian Permakanan	24		
		2.5.3	Penetapan Data Penerima Manfaat Program Pemberian			
			Permakanan	25		
		2.5.4	Perubahan Data Penerima Manfaat	26		
		2.5.5	Mekanisme Program Pemberian Permakanan	27		
,	2.6	Keran	gka Pikir	28		
III.	. M	ETOD	E PENELITIAN	29		
	3.1	Tipe P	Penelitian	29		
			Penelitian			
•	3.3	Lokas	i Penelitian	30		
	3.4	Sumbe	er Data	30		
	3.5	Teknil	c Pengumpulan Data	31		
	3.6	Teknil	Analisis Data	34		

3.7 Teknik Keabsahan Data	. 37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	. 40
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Gadingrejo	. 40
4.1.1 Kondisi Demografi	. 41
4.1.2 Kondisi Ekonomi	. 43
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	. 44
4.2.1 Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut	
Usia Tunggal di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten	
Pringsewu	. 45
4.2.1.1 <i>Context</i>	. 45
4.2.1.2 <i>Input</i>	. 56
4.2.1.3 <i>Process</i>	. 71
4.2.1.4 <i>Product</i>	. 91
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	. 98
5.2 Saran	. 99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Ta	bel Halam	ian
1.	Kelompok Masyarakat Kabupaten Pringsewu	5
2.	Jumlah Lanjut Usia Tunggal Penerima Manfaat Tahun 2022–2024	
	Kecamatan Gadingrejo	
3.	Penelitian Terdahulu	10
4.	Informan Penelitian	32
5.	Dokumentasi Penelitian	34
6.	Jumlah Penduduk Kecamatan Gadingrejo	41
7.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di	
	Kecamatan Gadingrejo	42
8.	Data Verifikasi Penerima Manfaat Program Pemberian Permakanan di	
	Kecamatan Gadingrejo	55
9.	Matriks Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Berdasarkan	
	Unsur CIPP(Context, Input, Process, Product)	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Lanjut Usia di Kabupaten Pringsewu tahun 2024	2
2. Kerangka Pemikiran Penelitian	28
3. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif	34
4. Peta Wilayah Kecamatan Gadingrejo	40
5. Peralatan Masak Gading Sehati	61
6. Kotak Makan Program Permakanan	62
7. Dapur Gading Sehati	63
8. Bukti Pengembalian Dana Pokmas Gading Sehati	66
9. Petunjuk Teknis Program Pemberian Permakanan	
10. Proses Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan	71
11. Proses Verifikasi Penerima Manfaat	
12. Berita Acara Pergantian Penerima Manfaat	73
13. Menu Makanan Pokmas Gading Sehati	
14. Proses Penyediaan Makanan	
15. Surat Tugas Petugas Kirim Gading Sehati	81
16. Aplikasi SIKSMA	
17. Penerimaan Makanan oleh Lansia Tunggal	83
18. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran	86
19. Rapat Pokmas Gading Sehati	
20. Laporan Tanda Terima Kecamatan Gadingrejo	
21. Laporan Lansia Penerima Manfaat Pada Aplikasi SIKSMA.	88
22. Paket Makanan Program Permakanan	92
23. Jumlah Makanan Program Pemberian Permakanan	93

DAFTAR SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ATENSI : Asistensi Rehabilitasi Sosial

BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

JUKNIS : Petunjuk Teknis

KK : Kartu Keluarga

KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

KPM : Keluarga Penerima Manfaat

NIK : Nomor Induk Keluarga

PIC : Personal In Charge

PKH : Program Keluarga Harapan

POKMAS : Kelompok Masyarakat

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen

PSKS : Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

REHSOS : Rehabilitasi Sosial

SIKSMA : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat

SK : Surat Keputusan

SOP : Standar Operasional Prosedur

TKSK : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Populasi lanjut usia terus meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini dikenal sebagai penuaan populasi (ageing population), yang menggambarkan perubahan demografi dengan proporsi penduduk lanjut usia yang semakin meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2021 Indonesia telah memasuki struktur penduduk tua, dengan jumlah lanjut usia yang mencapai 10% dari total populasi. Pada tahun 2023, angka ini meningkat menjadi 11,75% atau setara dengan 33,7 juta jiwa dari total penduduk. Tren ini menempatkan Indonesia pada kelompok negara yang menghadapi tantangan besar dalam menyediakan perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia, terutama lanjut usia yang tidak produktif secara ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2023).

Lanjut usia (lansia) merupakan individu yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas dan kelompok umur manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya (Raudhoh & Pramudiani, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Bab 1, Pasal 1 menjelaskan bahwa lanjut usia terdiri dari dua kategori yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia non-potensial. Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa lanjut usia potensial yaitu mereka yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa lanjut usia non-potensial yaitu mereka yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan pihak lain. Kelompok lanjut usia non-potensial ini seringkali menghadapi berbagai permasalahan seperti keterlantaran, kesulitan mengakses kebutuhan dasar, dan kemiskinan.

Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan lanjut usia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Bab 1, Pasal 1, Ayat 9 yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial secara terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Mewujudkan dan memelihara taraf kesejahteraan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperpanjang usia harapan hidup, penghormatan, dan penghargaan kepada lanjut usia. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, Bab 1, Pasal 1, Ayat 2, menjelaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar mereka tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk lansia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu, jumlah lansia di Kabupaten Pringsewu mencapai 50,5 ribu jiwa pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 53,7 ribu jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah lansia ini mengindikasi perlu adanya perhatian dari pemerintah dalam merancang program kesejahteraan bagi kelompok rentan.



Gambar 1. Jumlah Lanjut Usia di Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu, 2024

Grafik di atas menggambarkan distribusi jumlah lansia di Kabupaten Pringsewu berdasarkan kelompok umur. Kelompok usia 60-64 tahun memiliki jumlah tertinggi, yaitu 19,19 ribu jiwa. Peningkatan jumlah lansia ini mencerminkan perubahan demografis yang signifikan, yang berimplikasi pada berbagai aspek sosial dan ekonomi pada kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah meningkatnya jumlah lansia miskin dan terlantar, terutama mereka yang hidup sendiri tanpa dukungan keluarga. Kondisi ini menyebabkan banyak lansia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan yang cukup, bergizi, dan aman. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan keterbatasan fisik (Rahmayani et al., 2024). Kondisi kehidupan lansia yang tinggal sendiri atau yang disebut lansia tunggal membuat masyarakat merasa terbebani dengan kehadirannya, sehingga seringkali ditemukan lansia yang mengalami keterlantaran, kelaparan, keterasingkan, bahkan meninggal dunia tanpa diketahui pihak lain (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023).

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak dan kesejahteraan lansia, Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Pada Pasal 3 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa klaster sasaran rehabilitasi sosial mencakup lanjut usia, sedangkan Pasal 11 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa ATENSI diberikan dalam bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Regulasi ini menjadi landasan pelaksanaan berbagai program intervensi sosial, salah satunya adalah Program Pemberian Permakanan bagi lanjut usia tunggal. Program Pemberian Permakanan ditujukan sebagai jaminan sosial bagi lanjut usia berupa terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok rentan. Program ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 168/4/HK.01/11/2024 tentang Petunjuk **Teknis** Program Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal. Petunjuk teknis ini mengatur seluruh kegiatan dalam Program Pemberian Permakanan dari perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban. Sasaran utama program ini adalah lanjut usia tunggal yang berusia 70 tahun ke atas yang terkategori miskin dan memiliki

Kartu Keluarga (KK) tunggal. Program ini bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memberikan jaminan sosial bagi lansia tunggal melalui penyediaan makanan bergizi dua kali sehari. Komposisi makanan mencakup nasi atau makanan pokok lain, lauk pauk (hewani/nabati), sayur, buah potong, dan air mineral. Program Pemberian Permakanan didistribusikan setiap hari. Program Pemberian Permakanan di laksanakan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2022. Pada tahun 2022, anggaran awal yang dialokasikan untuk setiap penerima program berkisar Rp21.000,00 per orang. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp30.000,00 per hari untuk dua kali makan, dan nominal ini masih berlaku hingga saat ini (Daeli, 2024). Penyesuaian yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan gizi para penerima program, mengingat adanya kenaikan harga bahan pokok dari tahun ke tahun.

Pada pelaksanaan Program Pemberian Permakanan, Kementerian Sosial melibatkan Dinas Sosial Kabupaten untuk mengawasi dan monitoring pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu memberikan arahan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan tepat sasaran dan memastikan para penerima manfaat memperoleh bantuan makanan setiap harinya (Nikmah & Rahaju, 2021). Dengan demikian, Program Pemberian Permakanan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas), yaitu sekelompok individu di tingkat kelurahan yang memiliki kepedulian sosial tinggi, serta bersedia dan mampu melaksanakan tugas menyediakan dan mendistribusikan makanan secara konsisten setiap hari. Selain itu, keterlibatan beberapa orang melalui Pokmas juga bertujuan untuk ikut serta dalam memberdayakan masyarakat khususnya lanjut usia dan memberikan mereka peran aktif dalam mendukung kelompok rentan di lingkungan mereka (Daeli, 2024). Selain menyiapkan makanan, Kelompok masyarakat (Pokmas) juga memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan untuk pertanggungjawaban bulanan terkait penggunaan dana yang telah diterima. Laporan tersebut memuat informasi mengenai jumlah makanan yang disalurkan

serta rincian menu yang disajikan setiap harinya. Kelompok Masyarakat (Pokmas) juga terdiri dari petugas kirim makanan yang bertugas mendistribusikan makanan dan mengisi laporan bukti penerima manfaat setiap hari. Berikut adalah data lanjut usia tunggal penerima manfaat dan nama Pokmas yang tersebar di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2024:

Tabel 1. Kelompok Masyarakat Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Nama Kelompok Masyarakat (Pokmas)	Jumlah Penerima
1.	Gadingrejo	Gading Sehati	80
2.	Pagelaran	Pegelaran Jaya	70
3.	Pringsewu	Pringsewu Sejahtera	57
4.	Adiluwih	Adiluwih Sejahtera	48
5.	Ambarawa	Saras Makmur Ambarawa	48
6.	Sukoharjo	Sukoharjo berseri	49
		Jumlah	352

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2024

Berdasarkan tabel 1, Kabupaten Pringsewu memiliki enam Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang tersebar di enam kecamatan, dengan total jumlah penerima manfaat Program Pemberian Permakanan sebanyak 352. Kecamatan Gadingrejo tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, yaitu 80 lanjut usia tunggal. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pringsewu. Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Gadingrejo memiliki lanjut usia tunggal yang relatif besar dan terkategori miskin sehingga sangat membutuhkan dukungan Program Pemberian Permakanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, khususnya kebutuhan gizi.

Besarnya jumlah penerima manfaat di Kecamatan Gadingrejo tidak terlepas dari kondisi demografis wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu (2024), Kecamatan Gadingrejo memiliki jumlah penduduk lanjut usia yang mencapai 6.314 orang. Jumlah lansia yang cukup tinggi ini memperbesar kemungkinan adanya kelompok lanjut usia tunggal yang terkategori miskin. Kondisi ini menjadi alasan mengapa kuota penerima manfaat Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo lebih besar.

Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kabupaten Pringsewu khususnya di Kecamatan Gadingrejo perlu diperhatikan setiap kegiatannya, hal ini dikarenakan keberhasilan suatu program tidak hanya tergantung pada perencanaanya saja, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan. Penerima manfaat Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo juga tidak tetap setiap tahunnya. Berikut merupakan data lanjut usia tunggal penerima manfaat Program Pemberian Permakanan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2022–2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Lanjut Usia Tunggal Penerima Manfaat Tahun 2022–2024 Kecamatan Gadingreio

No	Tahun	Penerima Manfaat Program Pemberian Permakanan
1	2022	70
2	2023	95
3	2024	80

Sumber: Kelompok Masyarakat Gading Sehati (diolah peneliti Agustus 2024)

Tabel 2. menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Perbedaan jumlah penerima manfaat setiap tahunnya ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti lanjut usia tunggal yang pindah ke wilayah lain, meninggal dunia, menerima bantuan sosial lainnya dan perubahan kriteria penerima manfaat. Pada tahun 2022, lanjut usia penerima manfaat berusia 80 tahun ke atas, sedangkan pada tahun 2023 mengalami perubahan usia menjadi 70 tahun ke atas. Dengan demikian, penyesuaian jumlah penerima manfaat Program Pemberian Permakanan ini bertujuan untuk memastikan program lebih tepat sasaran dan diberikan kepada lanjut usia tunggal yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan pra-riset yang telah dilakukan, Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu pertama, masih terdapat keterlambatan distribusi makanan. Makanan yang seharusnya didistribusikan sebelum pukul 10.00 WIB seringkali terlambat. Hal ini mengakibatkan lanjut usia harus menunggu lama, yang berdampak pada pola makan mereka. Keterlambatan ini juga menimbulkan kecemasan,

terutama bagi lanjut usia yang bergantung penuh pada bantuan program tersebut. Kedua, kurangnya pengawasan gizi, hal ini dapat dilihat dari penyusunan menu harian belum melibatkan ahli gizi, sehingga kualitas nutrisi makanan yang diterima lanjut usia belum terjamin sepenuhnya sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing lansia.

Masalah serupa juga ditemukan dalam penelitian terdahulu yaitu penelitian Ismariana & Prabawati (2020), yaitu keterlambatan pencairan dana dan kurangnya petugas kirim menyebabkan distribusi makanan kurang efektif menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Program Pemberian Permakanan pada Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Selain itu, penelitian Kartika & Hardjati (2022) di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam Program Pemberian Permakanan yaitu keterlambatan distribusi makanan dan masih terdapat kesalahan dalam verifikasi penerima manfaat sehingga mengurangi keefektivitasan Program Pemberian Permakanan. Penelitian terdahulu memberikan gambaran yang spesifik dari Program Pemberian Permakanan tersebut, sehingga penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan pelaksanaan Program Pemberian Permakanan pada lokasi yang berbeda yaitu di Kecamatan Gadingrejo. Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Pemberian Permakanan yang sedang dilaksanakan sehingga dapat memberikan rekomendasi dan saran terkait pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo agar menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah yang telah dijelaskan, proses evaluasi menjadi aspek penting yang perlu digali lebih dalam karena keberhasilan program dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pelaksanaan program tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan efektivitas operasional program yang telah dirancang akan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Sebuah program tidak akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan jika tidak diimplementasikan dengan baik. Oleh

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada evaluasi program. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Model evaluasi ini mencakup empat aspek utama, yaitu context yang mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan program. Input, menilai sumber daya dan strategi yang digunakan. Process menganalisis pelaksanaan program. Product yang mengukur hasil dari program tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti "Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Tunggal (Studi Pada Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)."

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan Program Pemberian Permakanan bagi lanjut usia tunggal di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu (Studi Evaluasi Program)?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengevaluasi pelaksanaan Program Pemberian Permakanan bagi lanjut usia tunggal di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori evaluasi kebijakan publik dalam pelaksanaan Program Pemberian Permakanan bagi lanjut usia tunggal. Hasil penelitian dapat memperkaya diskursus tentang bagaimana kebijakan sosial diimplementasikan pada kelompok rentan, sehingga dapat menjadi referensi bagi studi kebijakan sosial lainnya.
 - b. Penelitian ini menambah literatur mengenai pelaksanaan Program Pemberian Permakanan yang berfokus pada lansia tunggal, dengan menyoroti dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal (Kecamatan Gadingrejo). Hal ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti

lain yang mengkaji kebijakan sosial serupa di berbagai konteks wilayah atau program.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meninjau kembali pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di seluruh wilayah salah satunya di Kecamatan Gadingrejo, agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif.
- b. Bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas), penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan saran terkait pelaksanaan Program Pemberian Permakanan. Pokmas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten, serta memastikan bahwa makanan yang disediakan sesuai dengan kondisi kesehatan lansia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah secara sistematis, baik dari segi konsep maupun teori. Dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk membantu membentuk perspektif, juga untuk memahami perbedaan antara studi-studi yang ada dan faktor-faktor kunci lainnya yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan pemahaman peneliti. Selain itu, penelitian terdahulu juga berperan dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat dijadikan landasan bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi baru dalam bidang yang dikaji.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Tahun, Nama Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	"Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Miskin di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubut Kota Surabaya" (2020) oleh Intan Ismariana & Indah Prabawati.	Teori evaluasi Dunn (2003): 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan 5. Responsivitas 6. Ketepatan	a) Efektivitas, Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Tembok Dukuh sudah efektif, pelaksanaanya sesuai dengan tujuan program yaitu pemenuhan kebutuhan pangan. b) Efisiensi, pada unsur ini pelaksanaan program belum optimal karena keterlambatan pencairan dana dan kurangnya jumlah petugas kirim. c) Kecukupan, program ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penerima manfaat. d) Pemerataan, program ini dibagikan merata pada penerima manfaat. e) Responsivitas, respon yang diberikan pihak terkait sudah sangat baik. f) Ketepatan, pelaksanaan program sudah tepat sasaran namun terdapat menu makanan yang tidak disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat.

2	"Evaluasi	Teori evaluasi Dunn	a) Efektivitas, Program Pemberian
2	Program	(2003):	Permakanan di Kelurahan Wonorejo
	Pemberian	 Efektivitas 	Surabaya sudah efektif sebab
	Permakanan	Efisiensi	pelaksanaannya sudah sesuai dengan
	Bagi Lanjut	Kecukupan	peraturan. b) Efisiensi, program ini
	Usia Miskin Di	4. Pemerataan	dikatakan belum efisien sebab masih
	Kelurahan	Responsivitas	terdapat kendala seperti pengurangan
	Wonorejo	Ketepatan	penerima bantuan permakanan dan
	Surabaya"		kelompok masyarakat yang belum
	(2023) oleh		memahami penggunaan media online
	Geiska Rievy		sehingga mengalami kesulitan ketika
	Lupe Pinthor,		mengunggah bukti laporan. c)
	Indah Murti,		Kecukupan , penyaluran Program
	Anggraeny		Pemberian Permakanan sesuai dengan
	Puspaningtyas.		sasaran dan penerima manfaat merasa
			tercukupi. d) Pemerataan,
			pendistribusian makanan sudah merata dengan porsi yang sama. e)
			dengan porsi yang sama. e) Responsivitas , unsur ini dikatakan
			sudah terpenuhi sebab warga Wonorejo
			mengungkapkan program ini sangat
			membantu. f) Ketepatan , pelaksanaan
			Program Pemberian Permakanan ini
			sudah tepat sasaran.
			-
3	"Evaluasi	Teori Evaluasi Dunn	a) Efektivitas, pelaksanaan Program
	Program	(2003):	Pemberian Permakanan di Kota
	Pemberian	1. Efektivitas	Surabaya efektif karena telah sesuai
	Permakanan	2. Efisiensi	dengan tujuan. b) Efisiensi, program ini
	Untuk	3. Kecukupan	dinilai belum efisien karena masih ada
	Meningkatkan	4. Pemerataan	keterlambatan pencairan dana. c)
	Kesejahteraan	5. Responsivitas	Kecukupan, pendistribusian makanan
	Masyarakat di	6. Ketepatan	sudah sesuai sasaran. d) Pemerataan,
	Kota Surabaya"		pendistribusian dilakukan secara adil,
	(2020) oleh Syarifah		merata dengan porsi yang sama. e) Responsivitas , unsur ini sudah
	Nikmah dan		terpenuhi karena penerima manfaat
	Tjitjik Rahayu.		merasa senang dan terbantu dengan
	ı jiyik Kanayu.		adanya program tersebut. f) Ketepatan,
			pelaksanaan Program Pemberian
			Permakanan di Kota Surabaya sudah
			sesuai dengan sasaran.
			sesuai dengan sasaran.

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2024)

2.2 Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson dalam Taufiqurakhman (2014) kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*). Pengertian ini

menunjukkan bahwa kebijakan publik diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai instansi pemerintah. Kebijakan publik berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkahlangkah yang akan diambil selanjutnya.

Menurut Thomas R. Dye dikutip dalam Subianto (2020) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan atau tidak, bergantung pada masalah yang muncul atau tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan. Interpretasi tersebut menegaskan bahwa kebijakan dilaksanakan oleh badan atau instansi pemerintah dan mencakup berbagai alternatif pilihan, baik untuk mengambil tindakan maupun tidak.

Menurut Arafat (2023), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga publik guna mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan ini meliputi tindakan nyata yang dirancang untuk menangani berbagai permasalahan publik, melindungi kepentingan masyarakat, serta mengelola sumber daya secara efektif. Sementara, menurut Agustino (2020) kebijakan publik adalah hasil dari interaksi yang intensif antara para aktor yang terlibat dalam pembuatannya, didasarkan pada fenomena yang membutuhkan solusi. Proses ini sering melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan keputusan yang diambil adalah yang paling optimal. Selain itu, kebijakan publik juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan multidisipliner atau interdisipliner, yaitu dengan memanfaatkan berbagai perspektif dari ilmu politik, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan antropologi. Dalam hal ini, proses

kebijakan mencakup beberapa tahapan penting, seperti perumusan, pelaksanaan (implementasi), dan evaluasi. (Tresiana dan Duadji, 2017).

Charles O. Jones dalam Tahir (2019) secara singkat menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah publik, yang melibatkan komponen-komponen berikut:

- 1) Goals atau sasaran yang merupakan tujuan akhir yang dicapai.
- 2) *Plans* atau proposal merupakan spesifikasi alat untuk mencapai tujuan tersebut.
- 3) Programs atau program merupakan alat formal untuk mencapai tujuan.
- 4) *Decision* atau keputusan merupakan tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- 5) *Effect* atau dampak bagi hasil terukur dari pelaksanaan program, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan baik dampak utama maupun dampak sampingan.

Berdasarkan pendapat diatas terkait kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik demi kepentingan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya mencakup tujuan-tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana tujuan tersebut akan dicapai melalui rencana, program, dan keputusan yang konkret. Kebijakan publik melibatkan berbagai pilihan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan kondisi atau permasalahan yang ada serta dampaknya pada masyarakat.

Kemudian, menurut Thomas R. Dye dalam Prabawati *et al.* (2019) tahapan pembuatan kebijakan publik meliputi:

 Identifikasi masalah kebijakan, pada tahap ini pemerintah mengumpulkan informasi, melakukan analisis, dan mengidentifikasi isu-isu yang perlu ditangani.

- 2) Penyusunan agenda (*agenda setting*), pada tahap ini memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik.
- 3) Perumusan kebijakan, tahap ini mengacu pada pengembangan opsi kebijakan yang dapat mengatasi masalah yang diidentifikasi.
- 4) Pengesahan kebijakan, tahap ini melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
- 5) Implementasi kebijakan, tahap pemerintah mulai melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan, dengan cara melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, serta mengkoordinasikan berbagai aktivitas guna memastikan kebijakan dapat berjalan sesuai rencana.
- 6) Evaluasi kebijakan sebagai tahap akhir, berfokus pada penilaian terhadap dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta ketercapaian tujuan kebijakan, apakah kebijakan tersebut telah memberikan hasil yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2.3 Evaluasi Kebijakan

2.3.1 Definisi Evaluasi Kebijakan

Menurut Charles O. Jones, seperti yang dikutip dalam Abdoellah & Rusfiana (2016), evaluasi adalah proses yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan memberikan manfaat. Dari sudut pandang manajerial, evaluasi berfungsi untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil secara objektif berdasarkan rencana dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah sebuah kebijakan atau program layak dilanjutkan, perlu diperbaiki, atau harus dihentikan. Bryan & White dikutip dalam Paramata *et al.* (2023) menyatakan bahwa evaluasi merupakan usaha untuk mencatat serta menilai apa yang terjadi dan alasan di balik terjadinya hal tersebut. Evaluasi sederhana dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai kondisi sebelum dan setelah pelaksanaan suatu program atau rencana.

Menurut Meutia (2017), evaluasi kebijakan merupakan persoalan faktual yang melibatkan pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakan maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program, sehingga menentukan langkah yang akan diambil dimasa yang akan datang. Sementara itu, menurut Pramono (2020) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap serangkaian tindakan yang telah direncanakan, diputuskan, dan dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan dalam peninjauan dan peningkatan pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan datang.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses penilaian yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi juga memberikan dasar untuk keputusan lebih lanjut mengenai apakah kebijakan atau program perlu diteruskan, diperbaiki dan dihentikan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak hanya menjadi alat pengendalian, tetapi juga panduan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di masa depan.

2.3.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan bertujuan apakah suatu kebijakan sudah berjalan sesuai dengan rencana atau belum. Tujuan dari evaluasi kebijakan menurut Subarsono (2005) sebagai berikut:

- Menilai sejauh mana kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan tercapai.
- Mengukur tingkat efisiensi kebijakan, evaluasi juga membantu mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

- 3) Menilai sejauh mana *output* dari suatu kebijakan dihasilkan, baik dari segi jumlah maupun kualitas.
- 4) Mengukur dampak kebijakan, termasuk efek positif dan negatif yang muncul dalam jangka panjang.
- 5) Mengidentifikasi potensi penyimpangan dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran awal dengan hasil yang telah dicapai.
- 6) Memberikan rekomendasi atau masukan untuk perbaikan dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.

2.3.3 Jenis Evaluasi Kebijakan

Secara umum, Nugroho dalam Hidayaturrahman *et al.* (2020) menyatakan bahwa terdapat 3 jenis evaluasi yaitu:

- Evaluasi pada tahap perencanaan
 Pada tahap ini bertujuan untuk menyeleksi dan menetapkan prioritas di antara berbagai alternatif kebijakan yang tersedia.
- 2) Evaluasi pada tahap pelaksanaan Pada tahap ini dilakukan dengan menganalisis sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.
- 3) Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan Pada tahap ini digunakan untuk menilai apakah hasil dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3.4 Tipe Evaluasi Kebijakan

Anderson dalam Hidayaturrahman *et al.* (2020) membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga tipe yaitu:

 Evaluasi kebijakan sebagai fungsional, pada tipe ini evaluasi kebijakan dianggap sebagai suatu kebijakan yang sama tingkatnya dengan kebijakan itu sendiri.

- 2) Evaluasi kebijakan yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan, pada tipe ini evaluasi membahas mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program serta mengenai kejujuran.
- 3) Evaluasi sistematis, pada tipe ini evaluasi kebijakan melihat secara langsung program kebijakan yang dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat dan seberapa berhasilnya pelaksanaan tersebut dari tujuan yang telah direncanakan pada awal pembuatan kebijakan.

2.3.5 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Meutia (2017) menyatakan bahwa terdapat 3 pendekatan dalam evaluasi kebijakan yaitu:

- 1) Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang akurat mengenai hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih lanjut nilai maupun manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan masyarakat secara luas.
- 2) Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi yang valid terkait hasil dari suatu kebijakan dengan tetap mengacu pada evaluasi yang didasarkan pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan disampaikan secara resmi oleh pembuat kebijakan serta tenaga administratif kebijakan. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal merupakan tolak ukur yang paling relevan dalam mengevaluasi nilai atau manfaat dari suatu kebijakan.
- 3) Evaluasi eksperimental merupakan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan sebelumnya, karena mencakup proses pemantauan dan penilaian (evaluasi) terhadap hasil kebijakan

dengan melakukan pengendalian langsung terhadap *input* dan jalannya proses kebijakan.

2.3.6 Model-Model Evaluasi Kebijakan

1. Model Bridgman & Davis

Bridgman & Davis dalam Agustina & Megawati (2022) menyatakan terdapat empat unsur utama dalam proses evaluasi kebijakan, yaitu:

1) Input

Input mengacu pada penilaian apakah sumber daya pendukung diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Unsur ini berkaitan dengan sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan, seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur.

2) Process

Process memfokuskan pada penilaian ataupun pengukuran sejauh mana program ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Unsur proses ini berkaitan dengan proses implementasi kebijakan, seperti perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan.

3) Outputs

Outputs ini lebih menekankan terhadap hasil capaian dari program kebijakan yang telah dilaksanakan. Outputs ini berkaitan dengan hasil yang dihasilkan dari implementasi kebijakan.

4) *Outcomes* (Dampak)

Outcomes berkaitan dengan dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan. Unsur ini berfokus pada pertanyaan dampak yang diterima masyarakat atau pihak yang menerima kebijakan.

2. Model Stufflebeam

Stufflebeam (2017) mengemukakan bahwa terdapat empat unsur evaluasi yang dikenal sebagai model CIPP yaitu:

1) Context

Evaluation Context (evaluasi konteks) adalah gambaran dan spesifikasi terhadap lingkungan program, mengidentifikasi penerima manfaat yang ditargetkan dan menilai kebutuhan mereka. kegiatan pengumpulan informasi untuk menentukan tujuan, mendefinisikan lingkungan yang relevan.

2) Input

Evaluation Input (evaluasi masukan) adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Evaluasi masukan berfungsi untuk membantu dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, memilih alternatif yang tepat, merencanakan strategi untuk mencapai tujuan, serta menetapkan prosedur kerja yang diperlukan. Komponenkomponen dalam evaluasi masukan mencakup: (a) sumber daya fasilitas dan peralatan pendukung, manusia, (b) dana/anggaran, dan (d) prosedur serta aturan yang dibutuhkan.

3) Process

Evaluation Process (evaluasi proses) digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi dan memberikan informasi untuk keputusan implementasi yang telah diprogram, menegaskan aktivitas yang berjalan dengan baik, dan mencatat serta menilai kejadian dan aktivitas prosedural.

4) Product

Evaluation Product (evaluasi produk) merupakan mengidentifikasi, menafsirkan hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan suatu program. Unsur ini memastikan seberapa

besar program telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok program yang dilayani.

3. Model William Dunn

Dunn (2003) mengembangkan enam unsur atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut:

1) Efektivitas

Efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, efektivitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah hasil yang diharapkan telah berhasil dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2) Efisiensi

Efisiensi terjadi saat penggunaan sumber daya dilakukan secara maksimal untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dunn (2003), efisiensi dapat diartikan sebagai seberapa besar upaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu.

3) Kecukupan

Kecukupan mengacu pada sejauh mana hasil kebijakan mampu mengatasi masalah yang ada. Kebijakan dianggap cukup jika berhasil menyelesaikan permasalahan yang menjadi tujuan awal penerapannya.

4) Pemerataan

Pemerataan umumnya dipahami sebagai keadilan, di mana setiap kelompok sasaran kebijakan mendapatkan hak yang sesuai. Kebijakan yang berlandaskan pemerataan adalah kebijakan yang memastikan upaya yang adil dapat dirasakan oleh penerima manfaat, agar kebijakan tersebut efektif, efisien, dan mencukupi kebutuhan penerima manfaat.

5) Responsivitas

Kriteria responsivitas berkaitan dengan reaksi dari kelompok sasaran terhadap kebijakan yang telah diterapkan, yang dapat berupa respons positif maupun negatif. Responsivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai dari kelompok masyarakat tertentu untuk mengevaluasi sejauh mana hasil kebijakan dapat memenuhi harapan mereka.

6) Ketepatan

Kriteria ketepatan berkaitan dengan sejauh mana pilihan alternatif kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi kelompok sasaran. Ketepatan ini merujuk pada kesesuaian dengan nilai-nilai tujuan program dan kekuatan argumen yang mendasari tujuan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) oleh Stufflebeam. Model ini dipilih karena menyediakan kerangka evaluasi yang komprehensif dan sistematis dalam menilai keberhasilan pelaksanaan Program Pemberian Permakanan bagi Lansia Tunggal. Model ini menganalisis terhadap berbagai aspek program, mulai dari kebutuhan dan tujuan awal, sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Model CIPP tidak hanya membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program tetapi juga memberikan wawasan mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan di masa mendatang. Oleh karena itu, model ini dianggap paling sesuai dalam menilai pelaksanaan Program Pemberian Permakanan bagi Lansia Tunggal di Kecamatan Gadingrejo.

2.4 Lanjut Usia

Menurut *World Health Organization* (WHO), lanjut usia adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Mereka termasuk dalam kelompok usia yang berada pada tahap akhir kehidupan, di mana terjadi proses penuaan (*aging process*). Proses ini merupakan akibat alami dari pertambahan usia, yang menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ tubuh. Perubahan tersebut umumnya mengarah pada penurunan

kemampuan fisik dan psikologis, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi lansia (Tristanto, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lanjut usia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial merujuk pada mereka yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja atau melakukan aktivitas yang menghasilkan barang maupun jasa. Sementara itu, lansia tidak potensial adalah mereka yang sudah tidak mampu lagi mencari penghasilan sendiri dan kehidupannya bergantung pada dukungan dari orang lain.

Batas usia lanjut usia mengalami perubahan seiring waktu. Menurut *World Health Organisation* (WHO) dalam Mujiadi (2022), lanjut usia dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Usia pertengahan (*middle age*), mencakup individu yang berusia 45 hingga 59 tahun.
- 2) Lanjut usia (*elderly*), yakni individu yang berusia 60 hingga 74 tahun.
- 3) Lanjut usia tua (*old*), yakni individu yang berusia usia 75 hingga 90 tahun.
- 4) Lanjut usia sangat tua (*very old*), yakni individu yang berusia lebih dari 90 tahun.

Selain itu, menurut Potter & Perry dalam Tadung *et al.* (2022) perubahan pada lanjut usia meliputi:

1) Perubahan Fisiologis

Perubahan fisiologis pada lansia, seperti kulit yang menjadi kering, rambut menipis, menurunnya fungsi pendengaran, dan berkurangnya curah jantung, merupakan bagian dari proses alami penuaan. Meskipun perubahan ini bukan tergolong kondisi patologis, namun dapat meningkatkan kerentanan lansia terhadap berbagai penyakit. Proses perubahan tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya usia dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti status kesehatan, pola hidup, tingkat stres, serta lingkungan tempat tinggal.

2) Perubahan Fungsional

Fungsi pada lanjut usia mencakup aspek fisik, psikososial, kognitif, dan sosial. Penurunan fungsi pada lanjut usia umumnya berkaitan dengan penyakit dan tingkat keparahannya, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas fungsional. Status fungsional lanjut usia mengacu pada kemampuan dan perilaku individu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (*Activities of Daily Living* atau ADL).

3) Perubahan Kognitif

Perubahan dalam struktur dan fisiologi otak, seperti berkurangnya jumlah sel dan perubahan kadar neurotransmitter, dapat mempengaruhi fungsi otak dan berkontribusi pada gangguan kognitif. Gejala seperti disorientasi, hilangnya kemampuan berbahasa dan berhitung, serta menurunnya kemampuan penilaian bukanlah bagian dari proses penuaan yang normal.

4) Perubahan Psikososial

Perubahan psikososial pada lansia merupakan bagian dari proses penuaan yang melibatkan berbagai tahapan kehidupan serta pengalaman kehilangan. Semakin panjang usia seseorang, semakin banyak perubahan dan kehilangan yang dialaminya. Transisi tersebut umumnya berkaitan dengan kehilangan, seperti memasuki masa pensiun, perubahan kondisi ekonomi, pergeseran peran dan hubungan sosial, serta penurunan kesehatan, kemampuan fisik, dan berkurangnya jejaring sosial.

Menurut Mujiadi *et al.* (2022) menyatakan bahwa adapun masalah yang dihadapi lanjut usia meliputi:

- 1) Kondisi fisik yang mulai melemah mengakibatkan lanjut usia rentan terkena penyakit.
- 2) Perkembangan kognitif yang menurun seperti semakin melemahnya daya ingat.
- 3) Masalah emosional yang seringkali meningkat terlebih lagi ada sesuatu yang kurang sesuai dengan kehendak pribadi lanjut usia.

4) Masalah spiritual seperti lanjut usia yang menghadapi kesulitan dalam menghafal kitab suci akibat penurunan kognitif, seperti daya ingat yang mulai melemah.

2.5 Program Pemberian Permakanan

Program Pemberian Permakanan merupakan bentuk bantuan sosial yang diberikan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang direalisasikan pada tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan nutrisi. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya lanjut usia tunggal dalam memenuhi kebutuhan pangannya agar memperoleh standar hidup yang layak.

2.5.1 Definisi Program Pemberian Permakanan

Program Pemberian Permakanan adalah program yang memberikan makanan kepada penyandang kesejahteraan sosial, seperti lanjut usia tunggal. Pemberian permakanan ini terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan air mineral yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali sehari dalam 1 (satu) kali pengantaran. Seluruh kegiatan pemberian permakanan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 168/4/HK.01/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal.

2.5.2 Tujuan dan Sasaran Program Pemberian Permakanan

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 168/4/HK.01/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal menyatakan bahwa Program Pemberian Permakanan bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memberikan jaminan sosial bagi lanjut usia tunggal dengan menyediakan kebutuhan dasar berupa pangan dan nutrisi yang memadai. Sasaran Program Pemberian Permakanan ini untuk lanjut usia keluarga tunggal dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Miskin atau tidak mampu.
- b. Lanjut usia berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih.

- c. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- d. Bukan berstatus sebagai pensiunan/istri/suami PNS dan atau Purnawirawan TNI atau Polri.
- e. Memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- f. Direkomendasikan oleh camat/kepala dinas sosial setempat sebagai calon Penerima Manfaat.

2.5.3 Penetapan Data Penerima Manfaat Program Pemberian Permakanan

Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 168/4/HK.01/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal menjelaskan bahwa penetapan data penerima manfaat Program Pemberian Permakanan mencakup beberapa tahap yaitu:

- a) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial terkait data calon penerima bantuan permakanan.
- b) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyerahkan data calon Penerima Manfaat kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang bersumber dari DTKS.
- c) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- d) Dinas Sosial berkoordinasi dengan Camat atau Kepala Distrik untuk melakukan verifikasi data calon penerima manfaat permakanan dengan melibatkan pendamping rehabilitasi sosial/pendamping PKH, TKSK dan PSKS lainnya.
- e) Hasil verifikasi berupa Nama, NIK, Nomor Kartu Keluarga (KK), usia, dan alamat calon penerima manfaat ditetapkan oleh Camat atau Kepala Distrik atau Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

- f) Data penerima manfaat yang telah diterapkan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- g) Pejabat Pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial membuat Surat Keputusan Penetapan Penerima Manfaat Permakanan yang terdiri atas daftar nama Penerima Manfaat Utama dan Penerima Manfaat Pengganti untuk selanjutnya disahkan oleh kuasa pengguna anggaran.

2.5.4 Perubahan Data Penerima Manfaat

Perubahan data Penerima Manfaat pada saat pemberian Permakanan sudah berjalan dapat dilakukan karena:

- 1. Meninggal dunia.
- 2. Menolak atas permintaan sendiri.
- 3. Pindah kecamatan domisili.
- 4. Sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat permakanan.

Perubahan data Penerima Manfaat dilakukan sebagai berikut:

- Dalam hal terjadi perubahan data Penerima Manfaat untuk sasaran, maka dituangkan dalam berita acara perubahan data Penerima Manfaat dan ditandatangani oleh camat/kepala distrik/nama lain atau dinas sosial daerah kabupaten/kota. Pengusulan data Penerima Manfaat Pengganti harus berdasarkan data calon Penerima Manfaat yang terdaftar pada Aplikasi SIKSMA.
- 2) Jika tidak terdapat data Penerima Manfaat Pengganti, maka Penerima Manfaat yang meninggal dunia, menolak atas permintaan sendiri, pindah domisili, atau tidak memenuhi kriteria dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah atau camat/kepala distrik/nama lain.
- 3) Apabila terdapat Penerima Manfaat yang meninggal dunia, menolak atas permintaan sendiri, pindah domisili, atau tidak memenuhi kriteria maka Permakanan yang dikirim pada hari tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas nama Lansia yang

- meninggal dunia, menolak atas permintaan sendiri, pindah domisili, atau tidak memenuhi kriteria.
- 4) Camat/kepala distrik atau kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota membuat berita acara perubahan data Penerima Manfaat.
- 5) Berita acara perubahan data Penerima Manfaat dan/atau surat keterangan disampaikan kepada PPK Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dengan tembusan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- 6) Berita acara perubahan data Penerima Manfaat dan/atau surat keterangan diunggah ke aplikasi SIKSMA oleh Pokmas. Selanjutnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia memverifikasi dan menyetujui perubahan data tersebut sebagai dasar perubahan surat keputusan PPK Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- 7) Pemberian Permakanan untuk calon Penerima Manfaat Pengganti hanya dapat diberikan apabila telah menyerahkan berita acara perubahan dan telah disetujui oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

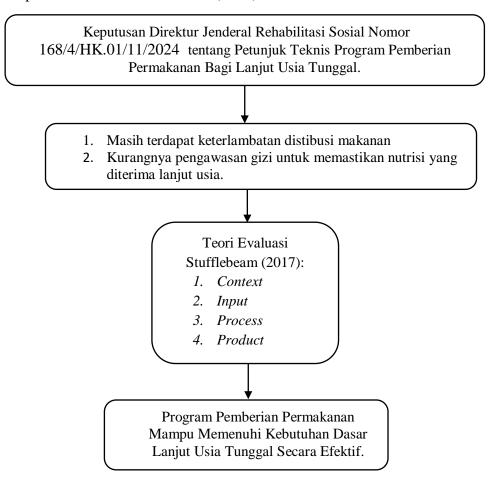
2.5.5 Mekanisme Program Pemberian Permakanan

Penerima bantuan permakanan ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diturunkan oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, yang kemudian meneruskan pelaksanaan program kepada pihak kecamatan. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana di lapangan. Seluruh proses, mulai dari pengajuan dan penetapan penerima manfaat, penyediaan dan distribusi makanan, hingga pelaporan, diawasi oleh *Personal In Charge* (PIC) melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (SIKSMA). SIKSMA merupakan aplikasi berbasis web dan mobile ini dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk memantau pelaksanaan Program Permakanan bagi Lanjut

Usia secara terintegrasi. Akses SIKSMA bersifat terbatas dan hanya diberikan kepada Pokmas dan petugas pengantar makanan yang telah mendapatkan persetujuan dari pengawas (Shalmadini, 2024).

2.6 Kerangka Pikir

Agar tujuan penelitian dapat dilakukan secara sistematis, maka diperlukan susunan konsep kerangka pikir yang dibuat berdasarkan permasalahan yang ada. Kerangka pikir merupakan alur pemikiran yang digunakan oleh penulis baik yang dikembangkan sendiri maupun diambil dari teori yang relevan untuk mengatasi masalah yang dirumuskan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan evaluasi terhadap Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan teori evaluasi yang diperkenalkan oleh Stufflebeam (2017).



Gambar 2. Kerangka Pikir Sumber: diolah peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan fenomena atau peristiwa secara terstruktur. Menurut Bogdan & Taylor, sebagaimana yang dikutip dalam Moleong (2017), metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari partisipan serta perilaku yang dapat diamati. Metode pengumpulan data melibatkan triangulasi, yaitu penggunaan berbagai teknik pengumpulan data, dan analisis data bersifat induktif dan kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini diambil karena peneliti ingin mendeskripsikan dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan Program Pemberian Permakanan bagi lanjut usia di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dengan merujuk kepada teori evaluasi kebijakan CIPP (*context, input, process, product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2017) yang mencakup empat unsur, yakni:

- Context berkaitan dengan identifikasi lingkungan program, tujuan Program Pemberian Permakanan, dan mengidentifikasi penerima manfaat yang ditargetkan.
- 2. *Input* berkaitan dengan sumber daya yang digunakan dalam Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo seperti sumber daya manusia, fasilitas/peralatan pendukung, anggaran dan prosedur

- atau aturan yang diperlukan dalam Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo.
- 3. *Process* berkaitan dengan implementasi Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo.
- 4. *Product* berkaitan dengan hasil yang dihasilkan dari implementasi Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu yang telah menjadi lokasi penerapan Program Pemberian Permakanan lanjut usia tunggal secara aktif. Penulis memilih lokasi ini karena Kecamatan Gadingrejo memiliki jumlah penduduk lanjut usia tunggal yang banyak sehingga penerima bantuan permakanan ini lebih banyak dibanding dengan kecamatan lain seperti Pringsewu, Sukoharjo, Ambarawa, Pagelaran dan Adiluwih. Maka dari itu, lokasi dengan penerima manfaat yang banyak dapat memberikan peluang untuk mengidentifikasi tantangan pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2017) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang dilakukan, dan terdapat data data tambahan seperti dokumen. Sugiyono (2022) sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan seperti wawancara dan observasi. Data primer digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Pada penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Tunggal di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, data primer diperoleh langsung dari sumber daya manusia yang terlibat dalam program tersebut dan memiliki pemahaman langsung terhadap isu yang diteliti. Melalui wawancara serta observasi langsung, peneliti mampu memperoleh

- wawasan mendalam mengenai bagaimana Program Pemberian Permakanan bagi lanjut usia tunggal diimplementasikan.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, namun melalui referensi yang sudah tersedia sebelumnya. Data ini berfungsi untuk melengkapi informasi yang didapatkan dari sumber data primer. Data sekunder dapat berupa dokumen, informasi tertulis, atau data yang telah diolah sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti mencakup berbagai jenis dokumen seperti Landasan hukum, petunjuk teknis Program Pemberian Permakanan, artikel jurnal dan literatur-literatur yang relevan dengan Program Pemberian Permakanan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2022) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat distruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini, wawancara dibagi menjadi 3 macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tak struktur. 1) Wawancara terstruktur berkaitan dengan peneliti yang telah mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 2) Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. 3) Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara tidak menggunakan pendoman wawancara yang telah tersusun lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2022). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, peneliti menyusun daftar pertanyaan tertulis sebagai instrumen utama penelitian. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan beberapa alat pendukung, seperti notebook, kamera, dan perekam suara. Sedangkan, pada wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak menyiapkan daftar pertanyaan tertulis

sebagai instrumen penelitian, melainkan hanya merancang topik-topik utama yang akan dibahas. Metode ini diterapkan pada hari pertama observasi untuk memperoleh gambaran umum tentang Program Pemberian Permakanan bagi lanjut usia di Kecamatan Gadingrejo.

Dengan ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data primer yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, penulis mewawancarai informan yang berkaitan dengan pelaksana Program Pemberian Permakanan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai fokus penelitian. Berikut adalah daftar informan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Nama	Informan	Informasi yang dicari
1.	Ika Hadiyati	Koordinator Program	Memberikan informasi terkait
	S.Pd. MM	Pemberian	perencanaan dan pelaksanaan
		Permakanan Dinas	Program Pemberian Permakanan
		Sosial Kabupaten Pringsewu	bagi lanjut usia tunggal
2.	Oki Saputra	Pendamping	Memberikan informasi mengenai
	Sos.I	Rehabilitasi Sosial	verifikasi (verifikasi) data
		(Rehsos)	penerima manfaat lanjut usia tunggal.
3.	Erliasih	Sekretaris Kelompok	Memberikan informasi mengenai
		Masyarakat (Pokmas)	pelaksanaan Program Pemberian
		Gading Sehati	Permakanan di Kecamatan
			Gadingrejo
4.	Minarti	Petugas Masak	Memberikan informasi mengenai
		Pokmas Gading	pengolahan makanan pada
		Sehati	Program Pemberian Permakanan
			di Kecamatan Gadingrejo.
5.	Heriyanto	Petugas Kirim	Memberikan informasi terkait
		Pokmas Gading	proses pendistribusian makanan
		Sehati	kepada lanjut usia dan kendala
			yang dialami.
6.	Jasem	Lansia Tunggal	Memberikan informasi terkait
	(77 Tahun)	Penerima Manfaat	kualitas makanan yang diterima
		Program Pemberian	dalam Program Pemberian
	Abdul Ghoni	Permakanan di	Permakanan di Kecamatan
	(74 Tahun)	Kecamatan	Gadingrejo
		Gadingrejo	
	Ratiman		
	(76 Tahun)	Int. Descrit: (2025)	

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

3.5.2 Observasi

Abdussamad (2021) mendefinisikan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang sedang diteliti. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai suatu peristiwa atau kejadian.

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan penulis adalah dengan melihat atau mengamati pelaksanaan Program Pemberian Permakanan bagi lanjut usia tunggal di Kecamatan Gadingrejo yang mencakup sarana dan prasarana yang digunakan dalam program permakanan, proses verifikasi penerima manfaat, proses pengolahan dan distribusi makanan dan respon penerima manfaat setelah adanya Program Pemberian Permakanan ini.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2022) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang dimaksud ini berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Metode ini melibatkan proses pengumpulan, pengamatan, dan analisis terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan topik atau subjek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat mencakup berbagai jenis, seperti laporan, surat, catatan, kebijakan, atau dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian.

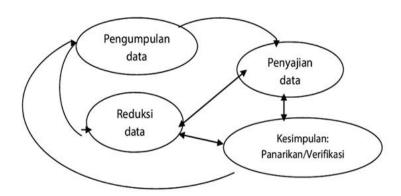
Tabel 5. Dokumentasi Penelitian

No	Nama Dokumen	Substansi Dokumen
1	Surat Keputusan Direktorat	Pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
	Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor	Program Pemberian Permakanan lanjut
	168/4/HK.01/11/2024	usia tunggal
2	Data BNBA Hasil Verifikasi	Data terkait lanjut usia tunggal penerima
	Pokmas Gading Sehati	manfaat di Kecamatan Gadingrejo tahun
	-	2024
3	Daftar Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas)
	(Pokmas) Kabupaten Pringsewu	yang ada di Kabupaten Pringsewu
4	Kecamatan Gadingrejo dalam	Dokumentasi mengenai gambaran umum
	Angka	Kecamatan Gadingrejo
5	Surat Tugas Petugas Kirim	Penetapan Petugas Kirim Pemberian
		Permakanan lanjut usia tunggal di
		Kecamatan Gadingrejo
6	Laporan Tanda Terima Pengiriman	Bukti tanda terima lansia penerima
	Program Permakanan di	manfaat setiap hari
	Gadingrejo	•
7	Berita Acara Pergantian Penerima	Pergantian penerima manfaat Program
	Program Pemberian Permakanan	Pemberian Permakanan lanjut usia
	-	keluarga tunggal di Kecamatan Gadingrejo
		2 22

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022), mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses interaktif yang berkelanjutan hingga data dianggap cukup. Tahapan analisis data ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik ini membantu peneliti dalam menyajikan data agar lebih mudah dimengerti. Berikut adalah bagan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1984).



Gambar 3. Komponen dalam analisis data (interative model)

Sumber: (Sugiyono, 2022)

1) Pengumpulan Data

Kegiatan utama dalam penelitian adalah pengumpulan data. Pada kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (triangulasi). Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan catatan lapangan yang berisi hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan Koordinator Program Pemberian Permakanan Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Sekretaris Kelompok Masyarakat Gading Sehati, Petugas Kirim Gading Sehati, Petugas Masak Gading Sehati, dan Lanjut Usia Penerima manfaat Program Pemberian Permakanan. Selanjutnya, observasi yang dilakukan mengenai pengamatan pada sarana dan prasarana yang digunakan, proses verifikasi penerima manfaat, penyediaan makanan dan distribusi makanan. Dokumentasi yang digunakan berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 168/4/HK.01/11/2024. jumlah menu makanan Program Pemberian Permakanan, Data BNBA Hasil Verifikasi Pokmas Gading Sehati, Daftar Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo dalam Angka, Surat Tugas Petugas Kirim, Laporan Tanda Terima Pengiriman Program Permakanan di Gadingrejo dan Berita Acara Pergantian Penerima Program Pemberian Permakanan.

2) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih informasi yang penting, dan memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan topik penelitian, serta mencari tema dan pola yang muncul. Hal ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas dan mempermudah proses pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2022). Pada penelitian ini, peneliti akan memilih informasi yang penting sesuai dengan topik penelitian, sehingga data yang terkumpul

dapat dideskripsikan dengan jelas. Peneliti mereduksi data sesuai dengan kebutuhan terkait pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo. Peneliti membuat pedoman wawancara mengenai informasi-informasi apa saja yang diperlukan dalam konteks evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sehingga hasil yang didapat sesuai dengan pembahasan.

3) Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya adalah menyajikan atau mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dilakukan dengan bentuk narasi yang lebih struktur yang disertai dengan tabel grafik, tabel, phie chard, dan sejenisnya guna memvisualisasikan analisis secara jelas, terperinci, dan mudah dipahami (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan grafik terkait jumlah lanjut usia di Kabupaten Pringsewu. Selain itu, peneliti juga menggunakan tabel untuk menyajikan data tentang jumlah penduduk Kecamatan Gadingrejo, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Gadingrejo, Penerima Manfaat Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo. Maka dari itu, penyajian data yang jelas akan memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian.

4) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dapat diartikan dengan seluruh data menjawab seluruh rumusan masalah pada penelitian. Selain menjawab rumusan masalah, juga mengungkapkan penemuan baru yang belum pernah ada (Sugiyono, 2022). Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil kesimpulan atau inti dari beberapa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ukuran validitas data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2022) untuk menilai keabsahan data dalam penelitian kualitatif maka harus melakukan beberapa uji keabsahan seperti:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Yang dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang melibatkan beberapa sumber daya untuk menguji kredibilitas data. Pada penelitian ini, peneliti membuat pertanyaan yang ditujukan kepada informan. Misalnya peneliti bertanya pada Koordinator Program Pemberian Permakanan Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu yang memahami perencanaan dan pelaksanaan program, setelah itu peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada Kelompok Masyarakat, setelah jawabannya sesuai maka peneliti melakukan wawancara dengan lanjut usia tunggal penerima manfaat terkait informasi yang didapat dari sasaran program.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan jenis triangulasi yang dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama menggunakan berbagai metode yang berbeda, guna memperoleh keakuratan dan keabsahan informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan cara observasi lokasi penelitian, sarana dan prasarana yang digunakan dan hasil observasi tersebut diperkuat oleh wawancara dengan sumber daya manusia pelaksana program. Kemudian, peneliti juga melihat dokumentasi pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 168/4/HK.01/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Tunggal, apakah hasil wawancara dan observasi sesuai dengan pelaksanaan program permakanan. Dengan melakukan triangulasi teknik, peneliti dapat

meningkatkan keandalan dan validitas data yang digunakan dalam penelitian.

c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah metode yang digunakan untuk menguji keakuratan data dengan mengecek ulang informasi dari sumber yang sama, namun dilakukan pada waktu yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan keandalan data dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan kondisi seiring berjalannya waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi waktu dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada informan dengan waktu yang berbeda. Hal ini didukung pada saat peneliti melakukan pra-riset sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti menanyakan pelaksanaan Program Pemberian Permakanan dan kendala yang dihadapi di lapangan kepada Koordinator Program Pemberian Permakanan, Pendamping Rehabilitasi Sosial, dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Gading Sehati dan data yang didapatkan ditanyakan kembali pada proses penelitian. Tujuannya untuk melihat apakah data tersebut bersifat tetap atau berubah seiring dengan berjalannya waktu.

2. Uji Transferabilitas

Uji transferabilitas (keteralihan) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Transferabilitas ini bertujuan agar hasil penelitian dapat dipahami dan dijadikan rujukan oleh pembaca atau orang lain dalam konteks serupa. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun deskripsi rinci terkait lokasi penelitian (Kecamatan Gadingrejo), menjelaskan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan mulai dari proses identifikasi penerima manfaat, mekanisme penyediaan dan distribusi makanan hingga pertanggungjawaban laporan. Selain itu, semua temuan dianalisis dengan menggunakan teori evaluasi CIPP (*Context, Input, Proses,*

Product) sehingga berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pemberian Permakanan dapat teridentifikasi dan dijelaskan secara sistematis berdasarkan masing-masing aspek evaluasi.

3. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas mengacu pada proses pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh tahapan penelitian. Proses ini melibatkan pihak independen, seperti auditor atau pembimbing, yang bertugas menilai keseluruhan aktivitas peneliti selama pelaksanaan penelitian. Pengujian ini biasanya dilakukan melalui seminar proposal dan seminar hasil, dengan melibatkan rekan sejawat, dosen pembimbing, serta dosen penguji sebagai bagian dari proses evaluasi.

4. Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas merupakan pengujian hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, Peneliti menyajikan bukti dokumentasi seperti foto proses pengantaran makanan, salinan laporan pertanggungjawaban Pokmas, serta data kehadiran penerima manfaat yang diperoleh dari Kelompok Masyarakat Gading Sehati. Data dan hasil wawancara dikaitkan langsung dengan hasil observasi dan dokumentasi, untuk memastikan bahwa temuan yang disajikan bukan hasil subjektivitas peneliti, melainkan benar-benar berasal dari data lapangan yang valid dan terverifikasi.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo belum berjalan efektif. Hal ini dilihat dari evaluasi dengan pendekatan CIPP (Context, Input, Process, Product) yang menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam setiap unsurnya. Pada unsur Context, meskipun Program Pemberian Permakanan memiliki latar belakang, tujuan dan penerima manfaat jelas, ditemukan resistensi dari sebagian lansia yang menolak bantuan karena lebih menyukai bantuan dalam bentuk tunai. Unsur Input, Program Pemberian Permakanan telah memiliki prosedur yang jelas dan pelaksanaan tugas yang jelas. Namun, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia terutama belum tersedianya tenaga ahli gizi. Selain itu, kondisi sarana seperti peralatan masak dan kendaraan distribusi sudah mulai usang yang mencerminkan lemahnya perencanaan logistik program dan masih terjadi keterlambatan pencairan anggaran yang menghambat kelancaran pelaksanaan program. Pada unsur *Process*, meskipun proses laporan pertanggungjawaban sudah disusun dengan baik, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti masih terdapat Kartu Keluarga (KK) milik lansia yang belum diperbarui sehingga belum mencerminkan status lansia tunggal, penyusunan menu belum melibatkan ahli gizi dan puskesmas, distribusi makanan masih mengalami keterlambatan dan aplikasi SIKSMA tidak stabil dan sering mengalami error. Terakhir, Unsur *Product*, meskipun program Pemberian Permakanan merupakan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial dan jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan sesuai dengan kuota penerima manfaat, namun menu makanan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi kesehatan lansia, sehingga sebagian dari mereka tidak mengonsumsi makanan-makanan tertentu.

5.2 Saran

Pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, peneliti memiliki beberapa saran atau masukan untuk pihak terkait dengan penelitian ini. Adapun beberapa saran tersebut yaitu:

- 1. Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Gading Sehati perlu mengintensifkan penyuluhan mengenai pentingnya makanan bergizi bagi lansia terutama yang menolak untuk mendapat bantuan, serta menjelaskan tujuan program bukan sekadar memberikan makanan, tetapi juga menjaga kesehatan mereka. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan aktif oleh aparat kelurahan yang bekerja sama dengan ketua RT dalam membantu lansia memperbaharui dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK). Mengingat banyak lansia yang kesulitan dalam mengurus administrasi, koordinasi melalui RT sebagai sebagai lini terdepan akan mempermudah identifikasi lansia yang membutuhkan bantuan.
- 2. Perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai peralatan masak yang digunakan oleh Pokmas guna memastikan bahwa seluruh peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kelayakan pakai, sehingga kualitas makanan yang disalurkan kepada lansia tetap terjaga dan layak konsumsi. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan anggaran yang lebih tepat waktu, proses perencanaan anggaran dapat dilakukan sebelum tanggal 1 agar awal bulan anggaran sudah siap dicairkan.
- 3. Dalam pelaksanaan program perlu adanya kerjasama dengan tenaga ahli gizi dan pihak puskesmas guna memastikan bahwa menu makanan yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi para lanjut usia, khususnya mereka yang memiliki pantangan atau kondisi kesehatan tertentu. Kerja sama ini dapat direalisasikan melalui perjanjian kerja sama (MoU) antara Dinas Sosial dengan Puskesmas terdekat, yang mencakup kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan

- berkala, penyusunan menu berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, serta edukasi gizi kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- 4. Kelompok Masyarakat (Pokmas) perlu melaporkan secara rutin dan detail kendala teknis yang terjadi pada aplikasi SIKSMA kepada pihak pusat, agar dapat segera ditindaklanjuti dan memastikan proses pelaporan harian berjalan lancar dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Suka Press.
- Agustina, D., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinana di Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 10(1), 175-190. https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p175-190
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2*). Bandung: Cv Alfabeta.
- Andari, I. D., Zulfiana, E., Arisanti, N. L., & Saputri, R. E. (2024). Peningkatan Pengetahuan Kader Dalam Deteksi Pemenuhan Gizi Lansia.. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(4), 3645-3654.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik : Teori dan Praktik*. Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. (2023). *Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu (Km2)*, 2022-2023. Pringsewu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. (2024). *Kecamatan Gading Rejo dalam Angka 2024*. Pringsewu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Pringsewu*. Pringsewu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu.

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Boli, E. B., Afelya, T., Astuti, D., Pratiwi, M. E., & Tobi, C. H. B. (2023). Edukasi Perencanaan Menu Berdasarkan Prinsip Gizi Seimbang bagi Lansia dengan Hipertensi di Panti Bina Lanjut Usia Pos 7 Sentani. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 30-37.
- Daeli, A. T. (2024). Implementasi Program Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlatar di Desa Awilega, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang. (Skripsi Sarjana, Politeknik Kesejahteraan Sosial). https://repository.poltekesos.ac.id/items/1a1f9614-f015-4536-a11b-450d484928e0
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halimatu, S. Aini, M. Mardiah, D. Hanifan, Apriliani, A. (2024). Kualitas Pelayanan Transportasi Publik. *Jurnal Karimah Tauhid*, 3(2). https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12027
- Hamali, A. Y. (2016). Pemahaman Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CAPS
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Medan: Wal ashri Publishing.
- Hidayaturrahma, M. et al. (2020). *Teori Sosial Empirik untuk Penelitian Ilmiah* (Skripsi, Tesis dan Disertasi). Malang: Edulitera.
- Ismariana, I., & Prabawati, I. (2020). Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Miskin di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. *Publika*, 8(4). https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/35605/31666
- Ismaya, N. R. P., & Widyastuti, Y. Y. (2025). Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) pada Lansia di Kecamatan Pabuaran. *Journal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP)*, *3*(1)
- Jimly. A. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta*: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- Kartika, R. R., & Hardjati, S. (2022). Efektivitas Program Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Miskin Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya: Effectiveness of the Food Program for Poor People with Disabilities in Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Anterior Jurnal, 22 (Special-1), 134-140. https://doi.org/10.33084/anterior.v22iSpecial-1.2952
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2023), *Pedoman pelaksanaan Bantuan Sosial Permakanan Lanjut Usia Keluarga Tunggal*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Laili, M. (2023). Evaluasi Program Pemberian Pemakanan bagi lanjut usia miskin dan lanjut usia terlantar di Kecamatan Pakal Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 3(1). https://doi.org/10.38156/jisp.v3i1.179
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Moenir. (2016). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mujiadi S.K., Rachmah, S. (2022). *Buku Ajar-Keperawatan Gerontik*. Mojokerto : STIKes Majapahit Mojokerto.
- Nikmah, S., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Surabaya. *Publika*, *9*(3),195-210. https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p195-210
- Nuraida, I. (2014). Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Paramata, M., Rares, J. J., & Ruru, J. M. (2023). Evaluasi Kinerja Pemerintah

 Desa Tasye Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi*Publik, 9(1), 169-178.

 https://doi.org/10.35797/jap.v9i1.47331

- Pelealu, R. R., Nayoan, H., & Sampe, S. (2022). Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *GOVERNANCE*, 2(2).
- Pinthor, G. R. L., Murti, I., & Puspaningtyas, A. (2023). Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 3(04), 68-86. https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1025
- Prabawati, I, Rahaju, T, & Kurniawan, B. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: UNESA University Press.
- Pramono, J. (2020). *Impelemtasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Rahmayani., et al (2024). Analisis Impelementasi Program Pelaksanaan Bantuan Permakanan Lanjut Usia Keluarga Tunggal Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia Tunggal (Studi Kasus di Kecamatn Baureno, Kabupaten Bojonegoro).

 Jurnal Manajemen Strategis dan Inovasi. Vol. 12, No.2.
 https://journalpedia.com/1/index.php/jmsi/article/view/1673
- Raudhoh, S., & Pramudiani, D. (2021). Lansia asik, lansia aktif, lansia poduktif. Medical Dedication (Medic): *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat FKIK UNJA*, 4(1), 126-130. https://doi.org/10.22437/medicaldedication.v4i1.13458
- Rifka R.N. (2017). *Step By Step Lancar Membuat SOP*. Yogyakarta: Hunta Publisher
- Sasongko dan Parulian. (2015). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shalmadini, H. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendistribusian Program Permakanan bagi Lanjut Usia Tunggal di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. (Skripsi Sarjana, Politeknik Kesejahteraan Sosial). https://repository.poltekesos.ac.id/items/9b6e56f8-ad19-464c-b37a-026dd55a46e9
- Setiawan, H. (2024). Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Gadingrejo. (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung)
- Sopian, A. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana: *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4(1).

- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G (2017). *The CIPP Evaluation Model*. New York London: The Guilford Press.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik:Tinjauan Perencanaan, Impelementasi dan Evalus*i. Surabaya: Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco, D. N. (2021). Program Bantuan Sosial Tunai 0BST) Covide-19
 Menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process dan Product
 di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.
 (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).
- Sumarsono, S. (2003). Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Syaputri, M. D., & Hariyadi, Y. S. (2020). Optimalisasi Program Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Usia Lanjut Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 85-89.
- Tadung, F. P., Mamuko, M. R., & Matsino, R. P. (2022). Pendampingan pastoral bagi kaum lansia di Panti Werda Damai Ronomuut. *POIMEN Jurnal Pastoral Konseling*, *3*(2), 26-43. https://doi.org/10.51667/pjpk.v3i2.1228
- Tahir, A. (2019). Kebijakan Publik dan Good Governancy. Gorontalo: UNG Press
- Tarigan, E. A., Sinurat, J., Ginting, I. B., Sihombing, R. P., & Lubis, P. K. D. (2024). Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada Rumah Makan Ondo Grill Batak. Maeswara: *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2 (3), 297–303.
- Taufiqurakhman, B. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Pers.
- Tresiana, N. & Duadji, N. (2017). Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Suluh Media.

- Tristanto, A. (2020). Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (dkjps) dalam pelayanan sosial lanjut usia pada masa pandemi Covid-19. *Sosio Informa*, 6(2), 205-222. https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2348
- Wardana, M. S., & Saribulan, N. (2024). Sosialisasi, Verifikasi Data dalam Pendataan Keluarga Miskin Pada Aplikasi Kelurahan On Mobile (Kelom) di Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasimalaya. *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, 4(2).
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).
- Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 168/4/HK.01/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal